

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Internasionalisasi Isu Papua yang dilakukan oleh Vanuatu merupakan salah satu bentuk dari adanya kepentingan nasional yang dimiliki oleh Vanuatu. Negara Vanuatu merupakan representasi masyarakat etnis Melanesia yang memiliki kepentingan untuk menjadi salah satu negara di Pasifik Selatan sebagai aktor yang membangkitkan kebangkitan Melanesia atau dikenal dengan *Melanesia Reinassance*. Dengan mengatasmamakan kekuatan solidaritas antar etnis Melanesia, Vanuatu mencoba terus mengupayakan Papua Barat agar turut serta memperoleh keadilan yaitu meraih kemerdekaannya. Terhitung sejak deklamasi kemerdekaan negara – negara Melanesia tahun 1970 – 1980, Vanuatu terus membawa perbincangan kejahatan atau pelanggaran terhadap kemanusiaan entitas Provinsi Papua sebagai bentuk propaganda melalui organisasi – organisasi internasional Pasifik maupun PBB.

Dalam menjawab kepentingan Vanuatu terkait keterlibatannya melalui upaya internasionalisasi isu Papua merdeka pada tahun 2017 -2020 atas separatisme Papua Barat dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, penelitian ini meninjau determinan kepentingan nasional yang dikemukakan oleh Hans. J. Morgenthau serta Joseph Nye. Melalui teori kepentingan nasional oleh dua penstudi HI tersebut terdapat premis bahwa kepentingan nasional negara demokratis salah satunya berupa menyinggung permasalahan seputar Hak Asasi

Manusia atau HAM. Hal tersebut menjadi selaras dengan apa yang dilakukan Vanuatu yaitu terus menyebarkan propaganda bahwa Papua Barat mengalami darurat isu pelanggaran HAM selama menjadi bagian dari NKRI.

Melalui pendekatan kepentingan nasional serta perkembangannya pada sistem demokrasi aktor negara dalam fenomena hubungan internasional, selanjutnya terdapat unsur fundamental di dalamnya. Unsur tersebut yaitu kepentingan nasional yang dilakukan Vanuatu memiliki sifat kepentingan nasional secara vital. Hal tersebut dibuktikan bahwa kepentingan nasional suatu negara dilakukan apabila negara tersebut merasa terdesak dan harus melindungi kedaulatan wilayahnya atau harga dirinya sebagai negara. Pada permasalahan berikut, Vanuatu merasa bahwa sebagai representasi dari etnis Melanesia yang wilayahnya telah merdeka harus ikut serta membebaskan wilayah Melanesia lainnya dari ketidakadilan seperti penjajahan kolonial terdahulu. Vanuatu bahkan berdalih sebagai etnis Melanesia, sejarah mereka telah ada sebelum zaman kolonialisme berlangsung.

Permasalahan atas terjadinya internasionalisasi isu Papua merdeka oleh Vanuatu, melalui sidang PBB dan kehadiran organisasi internasional lain dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang berpengaruh pada penelitian permasalahan berikut seperti adanya kepentingan kelompok separatis Papua yang terselubung selain atas dasar kesamaan etnis Melanesia. Dapat kita ketahui faktor yang berpengaruh lainnya berupa kepentingan vital Vanuatu atas harga diri etnis Melanesia agar mengalami kebangkitan, kepentingan kolektif negara – negara

Pasifik yang diwakilkan oleh Vanuatu dengan memperbincangkan permasalahan kemanusiaan atas masyarakat Provinsi Papua, serta identitas kolektif sebagai kebangkitan etnis Melanesia atau *Melanesia Reinassance*.

Faktor pertama berasal dari lingkup dalam negeri Vanuatu sendiri yaitu kepentingan vital atas harga diri etnis Melanesia. Serangkaian upaya yang dilakukan Vanuatu seperti menyampaikan pendapat, lobi politik, dan diplomasi yang juga dapat dilakukan melalui diplomasi internasional dalam kurun waktu 2014 – 2020 dalam menyebarkan propaganda atas telah terjadinya pelanggaran HAM di Papua Barat. Hal tersebut merupakan bentuk implementasi Vanuatu dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya yang telah menjadi kebijakan luar negeri mereka dengan mengandung orientasi keuntungan strategis bagi pengusaha pribumi di negara mereka.

Faktor kedua memiliki keterkaitan dengan kepentingan kolektif negara – negara Pasifik yang diwakilkan oleh Vanuatu dengan terus mengangkat permasalahan seputar kejahatan kemanusiaan yang dialami entitas Papua termasuk Provinsi Papua Barat. Dalam mewujudkan hal tersebut, negara – negara Pasifik Selatan melakukannya dengan dasar manifesto bentuk buku inspiratif bagi mereka karya Bernard Narokobi. Buku tersebut memiliki judul *The Melanesian Way* yang terbit tahun 1970 dengan penjabaran rinci bagaimana etnis Melanesia dapat mencapai kebangkitannya. Terdapat sebanyak enam proposisi utama dalam manifesto sosial budaya karya Bernard Narokobi tersebut. Manifesto pertama yaitu perlakuan tidak adil oleh para penjajah bahwa penindasan dan perlakuan tidak adil

terhadap orang Melanesia akan selalu dirasakan dimanapun keberadaan orang Melanesia.

Manifesto kedua pada *The Melanesian Way* sebagai pedoman bagi negara – negara Pasifik dalam mencapai *Melanesia Reinassance* ialah solidaritas antar ras. Timbulnya solidaritas ras Melanesia dijelaskan melalui manifesto karya Bernard Narokobi tersebut ada akibat pernyataan mengenai representasi penduduk Melanesia untuk semua penduduk Melanesia manapun. Manifesto ketiga pada buku yang sama berikut yaitu kebebasan Melanesia. Kebebasan dalam manifesto berikut artinya dapat direfleksikan sebagai kebebasan dalam sektor keuangan hingga sosbudpol. Manifesto keempat masih dalam buku karya Bernard Narokobi yaitu *Melanesian* dalam sudut pandang historis geografis. Mereka meyakini bahwa sebelum bangsa Eropa tiba peradaban geografis Melanesia telah ada lebih dahulu. Melalui hal tersebut, etnis Melanesia meyakini sejarah mereka telah terjadi sejak berpuluh tahun lamanya. Manifesto kelima yaitu gerakan non kekerasan dan perdamaian. Gerakan tersebut muncul sebagai bentuk persatuan masyarakat mereka yang merupakan penganut ajaran cinta kasih dari agama Kristen Protestan dan Katholik. Manifesto terakhir dalam *The Melanesian Way* yaitu spiritualisme atau agama sama dengan konsep pada poin kelima sebelumnya.

Faktor yang berpengaruh lainnya pada permasalahan atas terjadinya internasionalisasi isu Papua merdeka oleh Vanuatu berupa faktor ketiga atau terakhir yaitu identitas kolektif atas dasar kebangkitan etnis Melanesia atau *Melanesia Reinassance*. Dalam membahas mengenai permasalahan yang terjadi

antara Vanuatu dengan kelompok separatis Papua, terdapat tiga konsep yang menurut penulis menjadi manifesto politik etnis Melanesia dalam kepentingan Vanuatu melakukan upaya internasionalisasi isu Papua merdeka. Konsep pertama yaitu adanya komunalisme diantara negara – negara Pasifik seperti Vanuatu, yang coba diberikan terus menerus kepada pemahaman masyarakat Papua sehingga memberikan reaksi dan penyesuaian kebijakan yang cukup sulit dihindarkan guna mengakhiri keramaian atas simpati pada permasalahan kemerdekaan Papua. Konsep kedua yaitu adanya rasa senasib sepenanggungan antar warga Melanesia dikarenakan terdapat sebuah prinsip bahwa penindasan dan perlakuan tidak adil terhadap orang Melanesia akan selalu dirasakan dimanapun keberadaan orang Melanesia. Hal tersebut merupakan hasil dari adanya kesamaan sejarah yaitu bagian jajahan kolonial Eropa layaknya negara – negara Melanesia. Serta dengan konsep ketiga yaitu adanya solidaritas antar sesama ras melalui premis mengenai representasi penduduk Melanesia menderta akan dapat dirasakan penduduk Melanesia lainnya.

Maka dari kedua faktor di atas, kepentingan Vanuatu dalam melakukan upaya internasionalisasi isu Papua merdeka dilakukan dengan membawa isu Papua merdeka hingga forum internasional memiliki kepentingan ideologis melalui propaganda permasalahan seperti kejahatan kemanusiaan, sistem pemerintahan di Vanuatu, permasalahan *environmentalism*, hingga kemiripan etnis. Dalam menjembatani kepentingan Vanuatu di atas, OPM turut serta melakukan berbagai propaganda isu tersebut.

4.2. Saran

Dalam melakukan upaya internasionalisasi isu Papua merdeka, Vanuatu harus mempertimbangkan kembali mengenai kedaulatan sah yang dimiliki Indonesia atas Papua sebagai bagian dari wilayahnya sesuai dengan hasil keputusan UNTEA tahun 1962. Vanuatu juga harus mempertimbangkan bahwa diantara hubungan bilateralnya dengan Indonesia terdapat supremasi hukum dan asas – asas demokrasi yang berlaku, sehingga tidak terkesan gelap mata dalam membela dan memperjuangkan *Melanesia Reinassance* sebagai resolusi kebangkitan etnis Melanesia yang termasuk didalamnya masyarakat Papua. Vanuatu dengan mengatasnamakan negara – negara Pasifik Selatan lainnya juga harus menaati peraturan yang ada diantara hukum internasional yang berlaku bagi negara anggota organisasi internasional seperti MSG agar tidak sekadar berasumsi bahwa masyarakat Papua Barat diperlakukan tidak adil selama masih berada dalam naungan NKRI tanpa fakta data yang konkret.

Dalam penelitian ini penulis menyadari akan banyaknya kekurangan dalam berbagai faktor mulai dari teknis penulisan, rujukan literatur serta hal – hal lain dalam kaitannya dengan pembahasan penelitian berikut mengenai kepentingan Vanuatu dalam melakukan upaya internasionalisasi isu Papua merdeka ini. Adapun harapan penulis kedepannya agar penelitian berikut dapat memberikan kontribusi kepada para pembaca sekalian, khususnya kepada para peneliti yang memiliki fokus penelitian terhadap kajian keamanan internasional, seperti permasalahan separatisme yang terjadi di Papua.